

Pertanggungjawaban notaris terhadap perbuatan membantu melakukan tindak pidana penipuan : analisa Putusan Mahkamah Agung no. 2179K/PID/2009 tanggal 7 Februari 2011 = Accountability notary to help commit acts of criminal fraud : analysis of Supreme Court Decision no 2179K/PID/2009 dated 7 February 2011 / Nur Syamsiati Duha

Nur Syamsiati Duha, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20365019&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Seorang notaris dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang memperoleh nasihat terkait dengan sebuah akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Akan tetapi sekarang ini bahwa banyak notaris yang mau didikte oleh kliennya sekalipun harus bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan/atau kode etik profesi. Salah satu contoh kasus yang dilakukan notaris adalah sebagaimana kasus yang telah dibawa ke Mahkamah Agung dengan nomor perkara 2179K/Pid/2009 tanggal 7 Februari 2011. Kasus ini melibatkan notaris sebagai pihak yang telah melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana penipuan. Semua perbuatan notaris tersebut, masuk dalam ranah pidana. Notaris dapat saja melakukan pelanggaran hukum perdata, hukum pidana, maupun melakukan pelanggaran kode etik notaris. Atas pelanggaran tersebut, notaris dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berkaitan dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai tanggungjawab notaris dalam hal telah melakukan pelanggaran hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah tanggungjawab hukum yang diberikan kepada notaris yang melakukan tindak pidana penipuan, 2. Bagaimanakah tanggungjawab notaris atas kerugian salah satu pihak akibat tindak pidana penipuan yang dilakukannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif – empiris dengan strategi pendekatan masalah normatif terapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data meliputi Penelitian kepustakaan (library research) dan Penelitian lapangan (field research). Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

<hr>

ABSTRACT

A notary is considered as an official where one can obtain reliable advice. Everything written as well as the stipulation is true, it is a powerful document maker in a legal process . Therefore, the position of notary independent and impartial, then

the resulting certificate is a symbol and guarantee legal certainty for sure. But now it is extremely regrettable that many notaries who want to be dictated by its customers even have to conflict with legislation and/or codes of professional conduct. One example of a case that do want to be dictated by a notary public as customers and result in harming the interests of one of the parties is as a case that has been brought to the Supreme Court with the case number 2179K/Pid/2009. This case involves a notary as those who have committed or participated in the act on purpose to have the right to fight for something that is partly or wholly included items that belonged to someone else in his hand not because of crime. All the notary deed, into the criminal realm. Notaries may be in violation of civil law, criminal law, and violation of code of conduct notary. For the offense, a notary may be prosecuted to account for his actions. In connection with the above description, the writer is interested in conducting research on the responsibilities of a notary in the case has violated the law that has caused harm to the other party. Based on the above, the authors propose the following problems: 1. How legal responsibilities by the notary who committed crime of fraud and 2. How does legal sanction given to the notary who committed criminal fraud. This research was conducted with the normative legal approach - empirical strategy normative approach of applied problems . The data used in this study include primary data and secondary data. Data collection include research literature (library research) and field research. The data have been collected and then processed and analyzed with qualitative analysis with normative juridical approach.